

Manajemen Pembiayaan Pendidikan melalui Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

Nanu Andriani¹, Doni Ilyas², Manarul Hidayat³, Cici Rasmanah⁴, Irwan Nurjamiludin⁵

¹STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: nanuandriani@stittualfarabi.ac.id

²STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: doniilyas@stittualfarabi.ac.id

³STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: manarulhidayat@stittualfarabi.ac.id

⁴STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: cicirasmanah@stittualfarabi.ac.id

⁵STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: Irwannurjamiludin@stittualfarabi.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
09-09-2024

Direvisi:
14-10-2024

Diterima:
16-10-2024

Keywords : Sources of funds, Manajement, Financing

ABSTRACT

This study investigates the management of MAN 2 Pangandaran's main educational funding sources, which consist of the Budget Implementation List (DIPA), School Operational Assistance (BOS), and School Committee Funds. The focus of this study is on how the function, mechanism and effectiveness of each source help the operation and development of the school. The purpose of this research is to gain further understanding of the sources of funding and how they are managed, as well as how these impact on academic activities and the quality of education. The method used was qualitative with a case study. The results of this study show that effective and efficient management of funds from these three sources for education funding is essential for the sustainability of educational programs and student activities in schools.

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki pengelolaan sumber pendanaan pendidikan utama MAN 2 Pangandaran, yang terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Komite Sekolah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana fungsi, mekanisme, dan efektivitas masing-masing sumber membantu operasi dan perkembangan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang sumber pendanaan dan cara ketiga sumber dana tersebut dikelola, serta bagaimana hal-hal ini berdampak pada aktivitas akademik dan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana dari ketiga sumber ini untuk pendanaan pendidikan yang efektif dan efisien sangat penting untuk keberlangsungan program pendidikan dan aktivitas siswa di sekolah.

Kata Kunci : Sumber Dana, Manajemen, Pembiayaan

Corresponding Author : Nanu Andriani, STIT NU Al-Farabi Pangandaran, Jl. Raya Cigugur, KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: nanuandriani@stittualfarabi.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan suatu bangsa. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, diperlukan pendanaan dan pengelolaan yang baik dan efisien. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan (Fattah, 2012). Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan (Barnawi & M. Arifin, 2012). Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengalokasian sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar. Adapun menurut (Fattah, 2012) Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia (Mayasari et al., 2018). Pengelolaannya dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program yang ingin dicapai. Menurut Supriadi (2010), sumber-sumber pendanaan pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber pemerintah dan non-pemerintah. Pembiayaan pendidikan ini sangat diperlukan untuk program sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi sekolah dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan adalah faktor penting dalam untuk mewujudkan SDM yang berkualitas (Supriadi, 2010).

Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru yang disesuaikan dengan bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa berbanding guru, kualifikasi guru, tingkat, perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (*revenue theory of cost*). Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber-sumber dana, tetapi juga meliputi penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan.

Menurut (Fattah, 2012) menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut, (Sumarno, 2014) menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan pendidikan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Ia mengusulkan peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pendanaan pendidikan melalui berbagai skema seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan *public-private*. (Jones, 1985) memandang sumber pendanaan pendidikan sebagai berbagai saluran yang menyediakan dana untuk menjalankan sistem pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian adalah jenis penelitian yang memahami makna dan mengeksplorasi sejumlah individu atau kelompok orang (Creswell, 2013; Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi juga mencari data dari berbagai referensi baik

dari artikel, jurnal dan sumber lainnya. Analisis data yang diterapkan ialah dengan pendekatan deskriptif yang ditempuh melalui tiga rangkaian antara lain reduksi data, penyajian data, dan melakukan penarikan penyimpulan serta verifikasi (Abubakar, 2021; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa sumber pendanaan utama yang digunakan untuk menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Tiga di antaranya adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah), DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan dana dari Komite Sekolah. Sumber pendanaan bagi sekolah terutama untuk sekolah negeri umumnya dari berbagai sumber seperti

1. Pemerintah Pusat
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan
 - c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Pemerintah Daerah
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
 - b. APBD Kabupaten/Kota
3. Masyarakat
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua/wali murid
 - b. Sumbangan sukarela dari masyarakat atau donatur
 - c. Dana dari komite sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (M. R. Indonesia, 2019). BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dengan menyediakan dana operasional sekolah. Dana ini dialokasikan per siswa per tahun dan penggunaannya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Menurut (Ashari, 2016), peran dana BOS yaitu untuk membiayai kegiatan pembelajaran dan membiayai kegiatan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang berisi pendapatan dan belanja setiap satuan kerja (Kementerian/Lembaga) (P. P. Indonesia, 2003). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan dan menggunakan anggaran di instansi pemerintah, termasuk lembaga pendidikan negeri. DIPA memuat rincian alokasi anggaran yang telah disetujui dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran. Menurut (Barnawi & M. Arifin, 2012), DIPA digunakan untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang, dan belanja modal di sekolah negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, komite sekolah berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan (P. P. R. Indonesia, 2010). Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam pendidikan juga memiliki peran dalam pendanaan sekolah. Komite dapat menghimpun dana dari orang tua atau wali murid secara sukarela untuk mendukung program-program sekolah yang telah disepakati bersama. Penggunaan dana dari ketiga sumber ini harus dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Dengan adanya berbagai

sumber pendanaan ini, diharapkan sekolah dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada para siswa. Sumbangan dari komite sekolah digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan sarana prasarana, dan program-program sekolah lainnya (Rozi, 2019).

B. Sumber Dana Penyelenggaraan Pendidikan di MAN 2 PANGANDARAN

Sumber pendanaan di MAN 2 Pangandaran diperoleh dari dana DIPA, KOMITE, dan BOS. Setiap sumber pendanaan memiliki tujuan pembiayaan masing-masing seperti pertama, dana BOS merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Sumber dana BOS berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan khusus untuk pendidikan. Dana ini disalurkan langsung ke rekening sekolah dan digunakan untuk membiayai operasional sekolah non-personalia, seperti pembelian buku, alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler. Besaran dana BOS yang diterima setiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa. Kedua, DIPA, sebagai instrumen pelaksanaan anggaran, sumber dananya berasal dari APBN yang telah dialokasikan untuk kementerian atau lembaga tertentu, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk institusi pendidikan negeri, seperti sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri, DIPA menjadi dasar penggunaan anggaran yang telah disetujui. Dana dalam DIPA ini mencakup berbagai pos pengeluaran, termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. DIPA disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui DPR. Ketiga, dana Komite Sekolah berasal dari partisipasi masyarakat, terutama orang tua/wali murid. Sumber dana ini bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan. Dana Komite Sekolah biasanya digunakan untuk membiayai program-program pengembangan sekolah yang tidak tercakup dalam dana BOS atau DIPA, seperti pengadaan fasilitas tambahan, peningkatan mutu pendidikan, atau kegiatan kesiswaan tertentu. Pengelolaan dana Komite Sekolah harus transparan dan dipertanggungjawabkan kepada orang tua/wali murid serta masyarakat.

Penggunaan dana di MAN 2 Pangandaran digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang melibatkan guru maupun siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sumber utama pendanaan di MAN 2 Pangandaran berasal dari DIPA dan KOMITE. Setiap sumber memiliki tujuan pembiayaan masing-masing seperti DIPA untuk sarana prasarana, operasional sekolah, peralatan, ATK, belanja buku perpustakaan dan lainnya, dana BOS digunakan untuk gaji karyawan dan dana Komite untuk tambahan biaya untuk kegiatan siswa yang tidak terdani oleh DIPA dan BOS. Dengan adanya dana dari komite sekolah memiliki sumber tambahan. Dana komite berasal dari pembayaran siswa perbulan sejumlah yang di tentukan sekolah. Akan tetapi kenyataannya tidak semua dana masuk karena sekolah juga melihat kondisi dan ekonomi dari setiap siswa, maka dari setiap wali kelas memberikan data siswa yang kurang mampu maka dari itu untuk siswa yang kurang mampu pihak sekolah memberikan keringanan dengan membayar yang harusnya 12 bulan bisa bayar 8 bulan atau kurang menyesuaikan kondisi ekonomi orang tua dari para siswa.

C. Perencanaan Anggaran

Menurut (Mulyadi, 2016), Perencanaan anggaran pendidikan sebagai proses yang sistematis dan terstruktur untuk menentukan bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Penyusunan rencana anggaran dalam pembiayaan pendidikan merupakan proses krusial yang melibatkan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Inti dari proses ini adalah pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dokumen komprehensif yang merinci program, kegiatan, dan

anggaran sekolah untuk satu tahun ajaran. RKAS disusun dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan, seperti dana BOS, APBD, dan sumbangan masyarakat, serta mengalokasikan dana untuk berbagai aspek pengembangan sekolah, mulai dari kompetensi lulusan hingga sistem penilaian.

Proses penyusunan rencana anggaran dimulai dengan evaluasi diri sekolah dan identifikasi kebutuhan, dilanjutkan dengan penentuan prioritas program. Draft RKAS kemudian disusun dan dibahas bersama stakeholders sebelum finalisasi dan pengesahan. Prinsip-prinsip seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi panduan dalam penyusunan anggaran. Dalam penyusunan rencana anggaran, sekolah juga perlu melakukan analisis biaya, menyinkronkan dengan kalender pendidikan, dan menyediakan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan. Hasil akhir dari proses ini adalah rencana anggaran yang komprehensif, realistis, dan selaras dengan tujuan pendidikan sekolah, yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan sekolah sepanjang tahun ajaran.

Pada setiap awal tahun, MAN 2 Pangandaran biasanya akan mengadakan rapat untuk memusyawarahkan pembelajaran dan rapat anggaran. Sebelum rapat dilakukan, biasanya semua wakil kepala sekolah di bidang masing-masing mengajukan program dan anggarannya baik program untuk jangka pendek atau jangka panjang baik dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sarana prasarana, humas, kurikulum dan lainnya. Kemudian dilakukan identifikasi oleh pihak pengelola anggaran mana yang lebih penting atau darurat program untuk sekolah. Setelah dilakukan identifikasi oleh pihak pengelola anggaran kemudian diserahkan kepada sekolah untuk dikaji ulang dan menyetujui program apa saja untuk sekolah dan program mana yang harus di prioritaskan. Misal wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana mengajukan tempat ruang terpadu untuk tamu, karena ruang yang tidak memadai maka ruang OSIS bisa digunakan atau memultifungsi ruangan OSIS. Sebab tidak semua kebutuhan bisa langsung di lakukan dan ada.

D. Peran Kepala Sekolah

Menurut (Sutrisno, 2013), kepala sekolah harus berperan sebagai manajer dalam mengelola keuangan sekolah, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran. Kepala sekolah harus memastikan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan bahwa semua pengeluaran didokumentasikan secara rinci.

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Sebagai pemimpin dan manajer utama di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kepala sekolah memiliki peranan penting dalam setiap hal menyangkut kegiatan dalam sekolah maupun luar sekolah. Peran kepala sekolah seperti perencanaan anggaran, pengelolaan sumber dana, pengalokasian dana, pengawasan, pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi, penyelesaian masalah, dan evaluasi. contohnya dalam hal pendanaan atau pembiayaan di sekolah, kepala sekolah selalu memantau dan mengatur semua program baik jangka panjang maupun jangka pendek keuangan kemudian berkoordinasi dengan para pemegang kegiatan dan wakil kepala sekolah dan dikolaborasikan dengan pengelola keuangan, PPK, bendahara, dan KPA kemudian menyetujui kegiatan yang dibutuhkan. Skala prioritas di MAN 2 Pangandaran seperti kegiatan siswa, peralatan, alat tulis, gaji karyawan, buku, *wifi*, dan sarana penunjang lainnya.

E. Sistem Perencanaan

(Mulyadi, 2016) mengemukakan bahwa sistem perencanaan anggaran pendidikan harus berbasis kebutuhan, di mana perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan pendidikan

yang mendalam. Proses ini melibatkan analisis data yang akurat, penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana.

Sistem perencanaan anggaran atau keuangan sekolah merupakan proses komprehensif yang melibatkan berbagai tahapan penting. Dimulai dengan identifikasi kebutuhan sekolah untuk tahun ajaran mendatang, proses ini berlanjut dengan estimasi pendapatan dari berbagai sumber. Selanjutnya, rencana anggaran detail disusun, mencakup semua aspek pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan, dengan mempertimbangkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Anggaran yang diusulkan kemudian melalui proses persetujuan oleh pihak berwenang sebelum diimplementasikan. Selama tahun ajaran, pengeluaran dipantau secara ketat dan disesuaikan dengan rencana anggaran. Pemantauan rutin dan pelaporan keuangan berkala dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi efektivitas penggunaan anggaran dan penyesuaian terhadap perubahan keadaan juga menjadi bagian integral dari proses ini. Sekolah juga mengembangkan rencana keuangan jangka panjang untuk proyek-proyek besar atau inisiatif berkelanjutan.

Sistem perencanaan keuangan di MAN 2 Pangandaran dilakukan sedini mungkin bahkan bisa beberapa bulan sebelum diadakannya rapat, ini dilakukan agar setiap program yang akan dilakukan bisa terorganisasi dengan baik dan disesuaikan dengan keuangan yang ada dan jika dalam pengajuan program ada tambahan atau ada hal lain bisa dilakukan revisi sebelum rapat diadakan.

F. Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan anggaran dan keuangan sekolah. Namun, lembaga pendidikan sering menghadapi banyak masalah yang rumit. Keterbatasan dana yang tersedia merupakan masalah utama sehingga alokasi sumber daya sekolah harus dilakukan secara efektif (Nuriah & Deca, 2023). Seringkali, hal-hal berat harus diputuskan, seperti meningkatkan fasilitas pendidikan atau menaikkan gaji guru. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah masalah lain yang sering dihadapi. Banyak pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan orang tua siswa, mungkin tidak percaya pada hal ini (Mujayaroh & Rohmat, 2020). Selain itu, sekolah harus segera menyesuaikan diri karena regulasi pemerintah dan perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan, di MAN 2 Pangandaran yaitu kebutuhan yang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki yang mengakibatkan beberapa kegiatan atau kebutuhan di tunda dan menghemat agar pengeluaran tidak berlebihan. Dan juga Salah satu kesulitan utama adalah menyusun dan mematuhi anggaran yang efektif, mengingat banyaknya pengeluaran tak terduga yang dapat muncul. Setiap akhir tahun MAN 2 Pangandaran mengadakan rapat akhir tahun sekaligus mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan menyusun strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana.

G. Evaluasi Pengelolaan Anggaran

Evaluasi berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal yang amat penting. Evaluasi harus mencakup analisis kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran, serta dampak penggunaan dana terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Mulyadi juga mencatat bahwa evaluasi harus melibatkan pemangku kepentingan, seperti komite sekolah dan masyarakat, untuk memastikan akuntabilitas. Evaluasi dalam pengelolaan anggaran atau keuangan di sekolah merupakan proses penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan. Proses ini melibatkan beberapa tahap dan aspek kunci (Mulyadi, 2016).

Pertama, evaluasi biasanya dimulai dengan pemeriksaan kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasinya. Hal ini meliputi analisis apakah pengeluaran sesuai dengan yang dianggarkan dan apakah tujuan-tujuan finansial tercapai. Penyimpangan-penyimpangan yang signifikan perlu diidentifikasi dan dijelaskan.

Kedua, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap efisiensi penggunaan dana. Ini melibatkan analisis apakah sumber daya keuangan telah digunakan dengan cara yang paling optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Misalnya, apakah investasi dalam program tertentu menghasilkan peningkatan prestasi siswa yang sepadan.

Ketiga, aspek kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi juga menjadi fokus evaluasi. Ini termasuk memeriksa apakah prosedur keuangan telah diikuti dengan benar dan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

Keempat, evaluasi juga mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ini melibatkan penilaian apakah informasi keuangan telah disampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan dan apakah ada mekanisme yang memadai untuk pertanggungjawaban penggunaan dana.

Kelima, hasil evaluasi digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan dan menjadi dasar untuk perencanaan anggaran di masa mendatang. Ini membantu sekolah untuk terus meningkatkan praktik pengelolaan keuangannya.

PENUTUP

Pendanaan pendidikan di Indonesia bersumber dari tiga pilar utama, yaitu DIPA, BOS, dan Komite Sekolah. DIPA, yang berasal dari anggaran negara, dialokasikan untuk membiayai gaji pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan operasional sekolah negeri. BOS, bantuan dari pemerintah pusat, membantu meringankan beban biaya operasional sekolah negeri dan swasta, namun tidak termasuk gaji. Dana BOS diawasi oleh Komite Sekolah, yang dibentuk dari perwakilan orang tua/wali murid untuk membantu sekolah dalam melaksanakan program pendidikan. Komite Sekolah dapat mengumpulkan sumbangan dari orang tua/wali murid secara sukarela untuk membiayai program sekolah yang tidak tercakup DIPA atau BOS. Ketiga sumber pendanaan ini saling melengkapi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan finansial bagi penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Adapun sumber pendanaan di MAN 2 Pangandaran terdiri dari dana DIPA, BOS, dan Komite. Dimana setiap sumber memiliki tujuan dan pengelolaan masing-masing sesuai dengan capaian dan tujuan lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ashari, A. (2016). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 1–15.
- Barnawi & M. Arifin. (2012). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Indonesia, M. R. (2019). *Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/137713/permendikbud-no-3-tahun-2019>
- Indonesia, P. P. (2003). *UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Indonesia, P. P. R. (2010). *PP No. 17 Tahun 2010 Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010>
- Jones, T. H. (1985). *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. Macmillan Publishing Company.
- Mayasari, R., Shopiana, S., & Julham, T. (2018). MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN. *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46576/jsa.v3i2.482>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Mulyadi. (2016). *Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Nuriah, F. S., & Deca, D. (2023). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.214>
- Rozi, F. (2019). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 3(2), 113–122.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.
- Sumarno. (2014). Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Problematika dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 108–119.
- Supriadi, D. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, E. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.